



Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap *Financial Distress* Saat Pandemi Covid-19

(Studi Empiris pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2023)

Fathur Rahman As Shiddiq^{1*}, Fitra Dharma², Agrianti Komalasari³, Ayu Dwiny Octary⁴

¹⁻⁴ Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jalan.Prof. Dr. Ir. Sumantri Bojonegoro No.1 Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: fathurshiddiq29@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the influence of Good Corporate Governance (GCG) on financial distress in State-Owned Enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange during the COVID-19 pandemic. GCG is measured through the variables of Independent Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee. The data is analyzed using descriptive statistical methods and the Wilcoxon Signed Rank Test. The results of the research indicate that Independent Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee have a significant effect on financial distress in SOEs during the research period. This suggests that the implementation of good GCG principles can help reduce the risk of financial distress in SOEs in Indonesia. or formula.*

Keywords: GCG, BUMN, Distress

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *financial distress* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. GCG diukur melalui variabel Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan uji Wilcoxon *Signed Rank Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada BUMN selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dapat membantu mengurangi risiko *financial distress* pada perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia.

Kata kunci: GCG, BUMN, Distress

1. LATAR BELAKANG

Kondisi finansial yang tidak sehat dapat mengakibatkan kebangkrutan. Ketika bisnis mempunyai kesulitan dalam kondisi keuangan untuk memenuhi kehidupannya, maka bisnis tersebut sedang mengalami kesulitan. Beban tetap yang signifikan, termasuk bunga utang dan biaya operasional yang besar menjadi kontribusi utama dalam kondisi tersebut (Emerald et al., 2023). Berbagai kebijakan pembangunan menjadi pendorong dalam meningkatkan ekonomi, dengan membawa banyak perubahan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, peluang bisnis belum sepenuhnya memungkinkan bagi seluruh masyarakat luas untuk mengambil bagiannya dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai industri. Mengacu pada Pancasila sebagai UUD 1945, Indonesia senantiasa berusaha menciptakan masyarakat yang mempunyai kehidupan merata, berkecukupan, dan bahagia lahir batin sebagai negara hukum dan kesejahteraan. Berbagai

faktor sudah mempengaruhi kehidupan sebuah negara, seperti masyarakat, lingkungan, sumber daya, dan ekonomi; namun, ekonomi bukanlah salah satu tonggak keberlanjutan negara. Sistem perekonomian yang efektif dapat menghasilkan distribusi barang dan jasa yang lancar, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan nasional. Pemerintah Indonesia membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna membantu pertumbuhan ekonomi nasional karena menyadari pentingnya peran sebuah perusahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk mendorong perekonomian negara (Putri & Sitabuana, 2022).

Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai pedoman pengelolaan operasional perusahaan menjadi lebih sistematis, terkontrol, dan mengikuti tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dari perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Keuntungan utama penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu dengan membantu perusahaan menghindari tindakan tidak etis, terutama yang melibatkan orang dalam perusahaan. *Good Corporate Governance (GCG)* dapat mencegah berbagai bentuk manipulasi berlebihan terhadap aktivitas atau laporan keuangan, ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan, dan perilaku tidak etis lainnya. Sebaliknya, perusahaan abai ataupun menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* tanpa mengikuti aturan cenderung akan menghadapi masalah operasional, penurunan kinerja, kerusakan reputasi, dan risiko dalam keberlanjutan bisnis (Asril, 2019).

Kebangkrutan bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba pada sebuah bisnis; namun, dapat terjadi secara bertahap, bersama dengan tanda-tanda lain yang menunjukkan kebangkrutan berjangka panjang. Financial distress adalah indikator sebuah perusahaan akan segera mengajukan kebangkrutan. Sebuah perusahaan dianggap mengalami masa-masa sulit secara finansial ketika berada dalam masa krisis, yaitu ketika perusahaan mengalami defisit dalam keuangannya karena penurunan performa operasional berdampak pada kemerosotan pendapatan. Saat ini, pendapatan tersedia tak cukup guna menutupi semua beban operasional perusahaan juga melunasi kewajiban keuangan yang jatuh tempo (Sutra & Mais, 2019). Menerapkan metode yang dianggap sebagai *Good Corporate Governance (GCG)* bisa menurunkan risiko bisnis atau tantangan keuangan. Ketika seseorang mengajukan kebangkrutan, itu karena mereka mengalami financial distress. Dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan telah menyatakan kebangkrutan dengan melihat laporan keuangannya. Laporan-laporan ini merinci situasi keuangan bisnis, kinerjanya, dan setiap perubahan pada situasi tersebut dari waktu ke waktu. Untuk membuat penilaian yang tepat, laporan-laporan ini sangat berguna (Fathonah, 2016).

Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa kebangkrutan identik dengan financial distress sehingga ini adalah kesalahpahaman umum yang sering terjadi. Meskipun benar bahwa financial distress adalah pendahulu kebangkrutan perusahaan, namun juga benar bahwa tak semua yang menghadapi kesulitan bisa bangkrut (Primasari, 2017). Metode Altman *Z-Score* merupakan instrumen umum guna mengidentifikasi perusahaan berpotensi mengalami financial distress. Teknik Altman *Z-Score* merupakan instrumen kontrol terukur guna meninjau kesehatan keuangannya perusahaan yang menghadapi kesukaran. Metode Altman *Z-Score* digunakan oleh para analis untuk memastikan perusahaan mana yang paling mungkin menyatakan kebangkrutan dan perusahaan mana yang memiliki indikasi paling jelas untuk melakukannya. *Altman Z-Score* diaplikasikan guna memastikan apakah perusahaan sedang kesulitan finansial atau tidak. Beaver ialah orang pertama yang menyarankan metode ini pada tahun 1966; metode ini didasarkan pada statistik keuangan perusahaan dari lima tahun sebelum kebangkrutan. Pada tahun 1968, Altman menyempurnakan metodologinya. Pendirian BUMN oleh UU No. 19 (2003) merupakan salah satu tujuan utama, seperti yang diuraikan Pasal 2 (1). Tujuan ini guna menjamin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mengadakan produk berkualitas guna mencukupi kebutuhannya masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup orang banyak. Keadilan komutatif didasarkan pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang statusnya, harus memiliki alokasi sumber daya yang adil. Untuk mewujudkan manfaat bersama, sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat terlibat dalam interaksi yang adil dan setara. Namun demikian, banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian atau gagal mencapai kinerja keuangan yang memuaskan (Arini, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling dianggap sebagai pelopor pada tahun 1976 ketika mereka memperkenalkan konsep teori keagenan, seperti yang diyakini secara luas. Prinsipal serta agen yang saling bersaing merupakan komponen penting dari teori ini. Hubungan pemegang saham dan administrator (eksekutif) dijelaskan secara ringkas dalam konteks ini. Hubungan pemilik dan manajer cukup menantang sebab banyaknya kepentingan yang berlawanan yang harus diperhitungkan (Gama et al., 2024). Ketika kepentingan prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) bertentangan, konflik kepentingan, asimetri informasi, dan konflik keagenan dapat terjadi. Sering diasumsikan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal

ketika kedua belah pihak bertujuan sama, seperti menaikkan nilai perusahaan. Ketika manajemen tidak mempunyai saham kepemilikan penuh di perusahaan, konflik kepentingan dapat muncul. Sutra & Mais (2019) menyatakan bahwa manajer cenderung memprioritaskan kepentingannya sendiri daripada perkembangan perusahaan ketika mereka hanya memiliki sebagian kecil saham perusahaan.

Financial Distress

Kemajuan finansial perusahaan dapat dilacak dengan menganalisis laporan keuangannya, yang sering kali disediakan secara berkala seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Melacak pertumbuhan keuangan perusahaan dapat dilakukan, meskipun tidak mungkin untuk memprediksi semua faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar tagihan mungkin akan menyatakan kebangkrutan. Ketika status keuangan perusahaan memburuk sejauh ini, perusahaan tersebut dianggap mengalami kesulitan keuangan. Sederhananya, ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, biasanya itu berarti perusahaan akan menyatakan kebangkrutan. Sebuah perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan sebelum kebangkrutan atau likuidasi, yang merupakan posisi keuangan yang mungkin dialami oleh bisnis apa pun. Kondisi penurunan keuangan perusahaan harus segera ditangani, apabila tidak ditangani dengan serius maka ini akan menuntun perusahaan pada tahapan berikutnya berupa kebangkrutan (Hutabarat, 2020). *Financial distress*, merujuk pada situasi di mana entitas perusahaan mengalami defisit arus kas yang signifikan sehingga tidak mampu memenuhi liabilitas finansialnya. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh serangkaian faktor internal maupun eksternal, termasuk di antaranya inefisiensi dalam manajemen strategis, konstelasi pasar yang tidak kondusif, intensifikasi persaingan industri, serta kejutan-kejutan eksternal yang bersifat tidak terduga. Implikasi negatif dari kesulitan keuangan ini dapat merusak fundamental operasional perusahaan dan berpotensi mengakibatkan insolvensi, terutama pada periode kontraksi ekonomi, sebagaimana terilustrasi pada krisis finansial global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020 (Gao et al., 2025).

Altman (Z-Score)

Model *Z-Score* dikembangkan oleh Altman, seorang ekonom keuangan. Untuk melakukan hal ini, ia menggunakan pendekatan diskriminan yang memperhitungkan berbagai faktor, termasuk banyak metrik keuangan. Data laporan laba rugi beserta neraca, dibutuhkan guna meninjau model analisis *Z-Score*. Jika perusahaan menunjukkan tanda-tanda

ketidakstabilan, analisis *Z-Score* seperti ini dapat membantunya. Melalui analisis ini, manajemen dapat memproyeksikan prospek yang ada di perusahaan untuk masa depan dalam menjaga keberlanjutannya. Makin besar nilainya *Z*, makin besar peluang perusahaan bisa tetap bertahan, serta semakin rendah risiko kegagalan yang dihadapi (Anggraeni et al., 2021)

Good Corporate Governance (GCG)

Dalam bahasa Indonesia, *Good Corporate Governance (GCG)* adalah terjemahan umum dari *corporate governance*. Ini berarti bahwa perusahaan dipimpin dengan cara yang etis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Para pemangku kepentingan internal yang saling bergantung ialah bagiannya *Good Corporate Governance (GCG)* dimana pada gilirannya mencakup berbagai topik termasuk manajemen risiko dan pengambilan keputusan (Kusmayadi et al., 2015). *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan (Usman, 2021).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero maupun Perum sangat penting bagi perekonomian, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Dalam hal aktivitas perusahaan komersial, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero adalah pemain kunci yang membantu pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom (Persero), yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Penyediaan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat merupakan salah satu bidang di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum terlibat di dalamnya. Barang dan jasa penting yang menjadi kebutuhan masyarakat setiap hari merupakan bagian dari pelayanan tersebut. Jika perusahaan ingin terus melayani masyarakat pada tingkat tertinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum wajib memiliki manajemen yang efisien dan sukses. Kondisi ini harus dipenuhi. Dua kategori utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Persero dan Perum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 UU No. 19 (2003). Persero adalah nama untuk kedua jenis badan usaha milik negara ini (Harun, 2019).

Komisaris Independen

Meninjau dan mengendalikan aktivitas komisaris independen dalam sebuah perusahaan merupakan bagian penting dari tanggung jawab direksi sebagai pelaksana bisnis. Mengingat bahwa kepentingan pemangku kepentingan harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan,

masuk akal bahwa badan tersebut akan memiliki waktu yang lebih mudah jika komisaris independen diawasi secara ketat untuk setiap keputusan yang mereka buat. Dengan demikian, diharapkan para manajer akan menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik. Setidaknya ada dua anggota yang harus ada dalam komisaris independen, dengan ketentuan mengenai susunan dan fungsi organ perusahaan, yakni direksi serta komisaris independen, bagi perusahaan terbuka (emiten) yang tercantum di Pasal 20 (1) Bab 3 POJK No. 33/POJK.04/2014. Jumlah anggota komisaris independen dapat dilakukan penyesuaian untuk mencerminkan kompleksitasnya perusahaan jika efektivitas penetapan keputusan tetap terjaga. Komisaris independen bertugas mengawasi pelaksanaan strategi bisnis, mengelola tim manajemen, dan melaksanakan tugas-tugasnya (Kusmayadi et al., 2015).

Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi ialah komponen penting dalam manajemen perusahaan modern. Dewan direksi berperan sebagai pengawas independen terhadap manajemen, serta mewakili kepentingan pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis. Jumlah anggota dewan yang ideal akan bergantung pada kompleksitas bisnis perusahaan, serta faktor-faktor lain seperti *company size* dan struktur kepemilikan. Dewan direksi yang terlalu kecil dapat menghambat proses pengambilan keputusan juga mengurangi efektivitas pengawasan. Sebaliknya, dewan direksi yang begitu besar bisa membuat birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan biaya operasional. Oleh sebabnya, krusial untuk perusahaan guna menyusun komposisi dewan direksi yang seimbang, sehingga dapat memastikan tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan (Febriyanti & Khalifaturofi'ah, 2023).

Komite Audit

Anggota dewan dipilih untuk komite audit berdasarkan kredensial mereka untuk membantu auditor namun tetap independen. Komite audit biasanya terdiri dari 3,5, atau 7 direktur yang terlibat. Komite audit harus memiliki tiga anggota berdasar POJK No. 55/POJK.04/2015. Wajib ada dua anggota bukan dari perusahaan dan satu komisaris independen menjadi ketuanya. Komite audit mengawasi dan mengelola audit laporan keuangan untuk pelaporan keuangan. Komite juga memastikan norma dan standar keuangan dipatuhi. Hal ini dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan terhadap standar industri dan data lainnya. Komite juga harus menilai kompetensi dan biaya auditor eksternal. Komite audit mengontrol persiapan laporan keuangan manajemen dan auditor independen, sehingga sangat penting bagi tata kelola perusahaan. Hal ini memastikan keadilan dan kepatuhan *terhadap*

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dalam pelaporan keuangan perusahaan menurut teori keagenan (Kusmayadi et al., 2015)

Pengembangan Hipotesis

Kehadiran komisaris independen guna mengawasi dan meminimalisir dampak negatif dari konflik kepentingan yang mungkin timbul, terutama pada perusahaan yang mengandalkan dana masyarakat. Hal ini bertujuan menjaga kepentingannya investor saham minoritas dan stakeholders (Rustyaningrum & Rohman, 2021). Tingkat independensi komisaris independen yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan kualitas pengawasan, nantinya bisa mengurangi risiko *financial distress* perusahaan sehingga penilaian investor terhadap laporan keuangan berdampak pada kinerja keuangan di tahun berikutnya. Ini sebab komisaris independen bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan memastikan keputusan yang lebih rasional untuk kelangsungan perusahaan (Gunawijaya, 2015). Didasarkan atas penjabaran itu, maka hipotesis pertama yakni:

H₁: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Peningkatan kuantitas anggota dewan direksi menunjukkan korelasi negatif dengan probabilitas terjadinya *financial distress*. Hal ini dapat diatribusikan pada kapasitas pengawasan yang lebih komprehensif terhadap pelaporan keuangan yang dimiliki oleh dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar dibandingkan dengan dewan yang lebih kecil. (Hanafi & Breliastiti, 2016). Badan pengatur perusahaan, yang terdiri dari sejumlah anggota, dikenal sebagai dewan direksi. Jumlah direksi lebih tinggi tampaknya terkait ke probabilitas rendah dari kesulitan keuangan untuk bisnis. Kemungkinan perusahaan menghadapi *financial distress* bisa berkurang jika ada lebih banyak dewan direksi. Ini sebab ada fakta bahwa dewan direksi secara signifikan mengurangi probabilitas bencana keuangan perusahaan (Febriyanti & Khalifaturofi'ah, 2023). Didasarkan atas penjabaran itu, maka hipotesis kedua yakni:

H₂: Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Komite audit memegang peranan krusial dalam struktur tata kelola perusahaan, terutama dalam pengawasan aktivitas audit internal dan eksternal. Pembentukan komite audit bertujuan untuk memastikan independensi dan efektivitas proses audit, yang pada akhirnya berkontribusi pada integritas laporan keuangan perusahaan. Dengan mengawasi dan mengevaluasi kinerja auditor internal dan eksternal, komite audit membantu mencegah potensi kecurangan juga memastikan kepatuhannya akan standar akuntansi dan regulasinya (Haziro et al., 2017). Komite audit terdirinya dari komisaris independen (ketua), lalu dua anggota eksternal.

Peningkatan jumlah anggota komite audit diyakini berkorelasi positif dengan efektivitas pengawasan keuangan perusahaan. Dengan komposisi yang memadai, komite audit dapat melakukan diskusi yang lebih komprehensif dalam menangani potensi *financial distress*, sehingga meminimalkan risiko terjadinya *financial distress* (Sukawati & Wahidahwati, 2020). Didasarkan atas penjabaran itu, maka hipotesis ketiga yakni:

H₃: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda menggunakan program pengolah data SPSS versi 27. Untuk memastikan bahwa persamaan regresi memiliki estimasi yang akurat, bebas dari bias, dan konsisten maka dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Serta untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya maka dilakukan juga uji hipotesis berupa uji Wilcoxon *Signed Rank Test*.

Pengukuran Variabel

a. Variabel Dependen

Sebagai gambaran keadaan keuangan perusahaan yang mungkin mengarah pada kebangkrutan, *financial distress* berfungsi sebagai variabel dependen. Altman *Z-Score* ialah alat pengukurannya. Rasio-rasio yang berkaitan dengan likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas adalah contoh-contoh metrik tersebut. Setelah itu, rasio ini dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan mengalami *financial distress*. Sebuah persamaan linear yang mewakili beberapa metrik keuangan, seperti Altman *Z-Score*, yang mencakup empat atau lima koefisien “T”, yaitu (Goh, 2023):

$$Z = 0.012 X_1 + 0.014 X_2 + 0.033 X_3 + 0.006 X_4 + 0.999 X_5$$

Dimana:

$X1 = \text{Net Working Capital To Total Assets}$

$X2 = \text{Retained Earning To Total Assets}$

$X3 = \text{Earning Before Interest And Tax To Total Assets}$

$X4 = \text{Stock Market Value to Total Debt}$

$X5 = \text{Sales to Total Assets}$

Hasil perhitungan menurut Altman dapat menghasilkan nilai yang berbeda antar perusahaan dengan skala klasifikasi:

$Z < 1,81 = \text{Bangkut / zona distress}$

$1,81 - 2,99 = \text{Kritis / zona abu-abu}$

$Z > 2,99 = \text{Sehat / zona aman}$

b. Variabel Independen

1. Komisaris Independen

Komisaris independen sangat penting dalam memastikan bahwa konsep Good Corporate Governance (GCG) dipraktikkan. Ini dikarenakan komisaris independen dapat menjadi pengawas, mengawasi jalannya operasional perusahaan, dan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan. Komite audit harus dibentuknya oleh komisaris independen dengan anggota komite berasal dari kalangan komisaris yang tiada hubungan kepentingannya ke perusahaan (Syofyan, 2021). Rumusnya yaitu (Mandasari et al., 2022).

$$KOM_IND_t = \frac{\sum \text{Dewan komisaris independen}_t}{\sum \text{Dewan komisaris}_t}$$

2. Dewan Direksi

Dengan kewenangan yang cukup besar, muncul tanggung jawab dewan direksi, yang merupakan bagian integral dari proses strategi dan pembuatan kebijakan perusahaan. Komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi pola komunikasi dan koordinasi, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang ideal. Selain itu, status perusahaan akan berubah sebagai akibat dari setiap tindakan dewan direksi (Yuliani & Rahmatiasari, 2021). Pada riset ini, dewan direksi diprosikan dengan menghitung jumlah totalnya di perusahaan (Mayda & Serly, 2021).

$$DIR_SIZE_t = \sum \text{Dewan Direksi}_t$$

3. Komite Audit

Komite audit terdiri dari banyak anggota dewan direksi. Membantu auditor sekaligus menjamin independensi mereka adalah peran dari personel ini. Tanggung jawab mengawasi dan memantau proses audit laporan keuangan berada di tangan komite audit, yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit harus memastikan bahwa semua peraturan dan standar keuangan dipatuhi. Laporan keuangan harus sesuai dengan standar dan dikuatkan oleh informasi tambahan yang tersedia bagi komite agar hal ini dapat tercapai. Komite juga harus mengawasi kualitas layanan auditor eksternal dan kepraktisan tarif yang mereka sarankan (Hanifa et al., 2024).

$$KOM_SIZE_t = \sum Komite\ audit_t$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Penelitian ini melibatkan 19 perusahaan yang sesuai syarat sampel yang sudah ditetapkan dan tahun amatan 5 tahun, sehingga terdapat data observasi berjumlah 95.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FD	95	,075	6,844	1,25376	1,091461
KOM_IND	95	,200	,700	,43895	,124024
DIR_SIZE	95	1,000	11,000	5,97895	1,725768
KOM_AU	95	2,000	7,000	3,84211	1,034673
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data olahan (2025)

Berdasarkan Tabel diatas variabel dependen yakni *financial distress*, nilai terendahnya ,075 yang didapat pada PT PP Properti periode 2023 serta tertinggi 6,844 ada di PT Indofarma periode 2020. *Financial distress*, nilai meannya 1,25376 dan nilai deviasi standar 1,091461 menunjukkan bahwa data mempunyai variasi yang tinggi karena nilai deviasi standar diatas mean.

Variabel komisaris independen bernilai terendah 0,200 sebanyak 1 perusahaan yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan nilai tertinggi 0,7 sebanyak 2 perusahaan diantaranya PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) tahun 2023 dan PT PP Properti 2020-2023. Komisaris Independen rata-ratanya 0,43895 lalu nilai deviasi standarnya 0,124024, tandanya rata-rata proporsi Komisaris Independen dalam perusahaan cenderung rendah.

Variabel dewan direksi bernilai terendah 1,000 ada pada PT Semen Baturaja (SMBR) periode 2022 dan nilai tertinggi 11,000 yang terdapat pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 2019-2020. Dewan Direksi reratanya 5,97895 dengan deviasi standarnya 1,725768. Nilai deviasi standarnya lebih kecil dibanding mean artinya jumlah Dewan Direksi antar perusahaan sampel memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Sementara itu, nilai mean yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa jumlah Dewan Direksi dalam perusahaan sampel cenderung besar.

Variabel komite audit bernilai terendah 2,000 ada di PT Indofarma (INAF) periode 2023 serta memiliki nilai tertinggi 7,000 PT Kimia Farma periode 2020, PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) periode 2020. Komite Audit reratanya 3,84211 dengan deviasi standarnya 1,034673. Nilai deviasi standar ini menunjukkan adanya variasi dalam jumlah anggota Komite Audit di antara perusahaan sampel. Sementara itu, nilai mean tersebut mencerminkan rata-rata, perusahaan dalam sampel memiliki sekitar 3 hingga 4 anggota dalam Komite Audit. kesatu.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96496127
Most Extreme Differences	Absolute	,137
	Positive	,137
	Negative	-,096
Test Statistic		,137
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<,001
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data olahan (2025)

Berdasarkan tabel 4.3, tampak Asymp. Sig 0,000 > 0,05 yang mencerminkan distribusi data tidak normal. Hal ini dikarenakan oleh perolehan data dari perusahaan sampel tidak stabil atau terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Dengan begitu, model penelitian ini belum normal.

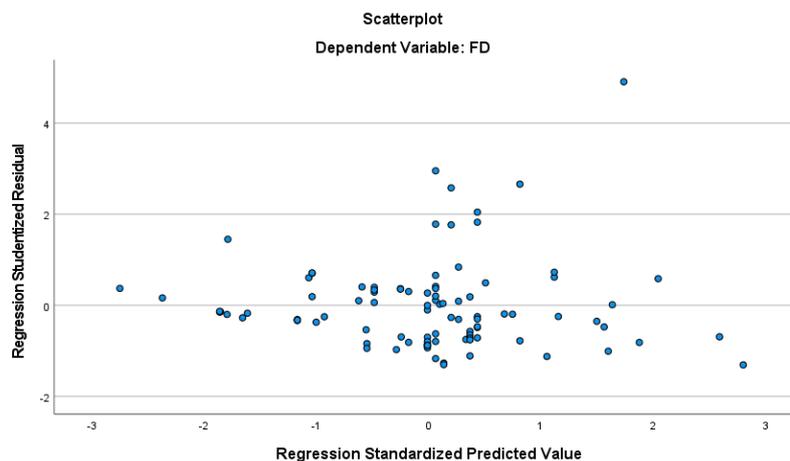
Uji multikolinearitas

Tabel 3			
Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolernace	VIF
1	(Constant)		
	KOM_IND	,912	1,097
	DIR_SIZE	,629	1,589
	KOM_AU	,679	1,474
a. Dependent Variabel: FD			

Sumber: Data olahan (2025)

Berdasar hasil ujinya, setiap variabel independen, yaitu KOM_IND, DIR_SIZE, KOM_AU, dan nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Ini menunjukkan model regresi penelitian ini tak mengalami masalah multikolinearitas. Dengan demikian, tak terjadi korelasi sempurna antar variabel independen yang bisa memengaruhi hasil estimasi regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data olahan (2025)

Berdasar Gambar 1, grafik scatterplot berupa titik-titik acak di sekitar sumbu horizontal (nilai 0 pada sumbu Y) tak berpola, tandanya model regresi tak terkena heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,467 ^a	,218	,193	,980738	,764
a. Predictors: (Constant), KOM_AU, KOM_IND, DIR_SIZE					
b. Dependent Variable: FD					

Sumber: Data olahan (2025)

Tabel 4.6 memperlihatkan nilai Durbin-Watson yang ditentukan 0,764. Hasilnya, secara sistematis dapat dinyatakan sebagai $-2 < 0,764 < 2$, yang menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif dalam residual. Regresi linier berganda dianggap tidak layak dioperasikan pada model riset ini.

Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress*

Tabel 5

Ranks				
		N	Mean rank	Sum of Ranks
FD - KOM_IND	Negative Ranks	22 ^a	21,18	466,00
	Positive Ranks	73 ^b	56,08	4094,00
	Ties	0 ^c		
	Total	95		
a. FD < KOM_IND				
b. FD > KOM_IND				
c. FD = KOM_IND				

Sumber: Data olahan (2025)

1. Negatif Ranks: Selisih (-) antara hasil FD dan KOM_IND menunjukkan nilai 21,18. Pada nilai N, Mean Rank, maupun Sum Rank, didapatkan nilai 466,00. Ini menunjukkan bahwa ada 22 pasangan data (perusahaan) di mana nilai FD lebih rendah dibandingkan dengan nilai Komisaris Independen (KOM_IND).

2. Positif Ranks: Selisih (+) antara FD dan KOM_IND terdapat 73 data positif (N), artinya ke-73 perusahaan ada peningkatan dalam kinerja Komisaris independen. Rerata peningkatannya ialah 56,08, lalu jumlah ranking positifnya 4094,00.
3. Ties: Terdapat 0 nilai yang sama antara FD dan KOM_IND, tiada perusahaan yang mengalami perubahan antara kedua kondisi tersebut.

Dewan Direksi berpengaruh terhadap *financial distress*

Tabel 6

Ranks				
		N	Mean rank	Sum of Ranks
FD - DIR_SIZE	Negative Ranks	93 ^a	48,71	4530,00
	Positive Ranks	2 ^b	15,00	30,00
	Ties	0 ^c		
	Total	95		
a. FD < DIR_SIZE				
b. FD > DIR_SIZE				
c. FD = DIR_SIZE				

Sumber: Data olahan (2025)

1. Negatif Ranks: Selisih (-) antara hasil FD dan DIR_SIZE menunjukkan nilai 48,71. Pada nilai N, Mean Rank, Sum Rank, didapatkan nilai 4530,00. Ini tandanya ada 93 pasangan data (perusahaan) di mana nilai FD lebih rendah dibandingkan dengan nilai ukuran Dewan Direksi (DIR_SIZE).
2. Positif Ranks: Selisih (+) antara FD dan DIR_SIZE terdapat 2 data positif (N), yang berarti ke-2 perusahaan tersebut mengalami peningkatan dalam kinerja. Rata-rata peningkatan (Mean Rank) adalah sebesar 15,00, sedangkan jumlah ranking positif (Sum Rank) adalah 30,00.
3. Ties: Terdapat 0 nilai yang sama antara FD dan DIR_SIZE, yang berarti tidak ada perusahaan mengalami perubahan antara kedua kondisi tersebut.

Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress***Tabel 7.**

Ranks				
		N	Mean rank	Sum of Ranks
FD - KOM_AU	Negative Ranks	91 ^a	49,04	4463,00
	Positive Ranks	4 ^b	24,25	97,00
	Ties	0 ^c		
	Total	95		
a. FD < KOM_AU				
b. FD > KOM_AU				
c. FD = KOM_AU				

Sumber: Data olahan (2025)

1. Negatif Ranks: Selisih (-) antara hasil FD dan KOM_AU menunjukkan nilai 49,04. Pada nilai N, Mean Rank, Sum Rank, didapatkan nilai 4463,00. Ini tandanya ada 91 pasangan data (perusahaan) di mana nilai FD lebih rendah dibandingkan dengan nilai KOM_AU.
2. Positif Ranks: Selisih (+) antara FD dan KOM_AU ada 4 data positif (N), yang berarti ke-4 perusahaan tersebut mengalami peningkatan dalam kinerja. Rerata peningkatannya 24,25, lalu jumlah ranking positifnya 95,00.
3. Ties: Terdapat 0 nilai yang sama antara FD dan KOM_AU, tiada perusahaan mengalami perubahan antara kedua kondisi tersebut.

Pembahasan**Komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress***

Hasil uji hipotesis memperlihatkan variabel komisaris independen memiliki nilai statistik Z -6,733 yang berarti bahwa dalam mayoritas sampel, nilai *financial distress* setelah mempertimbangkan ukurannya komisaris independen lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Ini tandanya peningkatan ukuran komisaris independen berkaitan dengan penurunan *financial distress*. Nilai signifikansinya ($<0,001$) $< \alpha$ (0.05) menunjukkan terdapat perbedaan signifikan secara statistik diantara *financial distress* dan komisaris independen. Dengan begitu, hipotesis (H1) terdukung.

Dewan Direksi berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil uji hipotesis memperlihatkan variabel dewan direksi bernilai statistik Z -8,352 tandanya bahwa dalam mayoritas sampel, nilai *financial distress* setelah mempertimbangkan ukuran dewan direksi lebih kecil dibanding sebelumnya. Ini pun memberi tahu bahwasannya

peningkatan ukuran dewan direksi berkaitan dengan penurunan *financial distress*. Nilai signifikansinya ($<0,001$) $< \alpha$ (0.05) menunjukkan ada perbedaan signifikan secara statistik antara *financial distress* dan dewan direksi. Dengan begitu, hipotesis (H2) terdukung.

Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil uji hipotesis memperlihatkan variabel komite audit bernilai statistik Z -8,103 yang berarti bahwa dalam mayoritas sampel, nilai *financial distress* setelah mempertimbangkan ukuran komite audit lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Ini memperlihatkan peningkatan ukuran komite audit berkaitan dengan penurunan *financial distress*. Nilai signifikansinya ($<0,001$) $< \alpha$ (0.05) tandanya ada perbedaan signifikan antara *financial distress* dan komite audit. Dengan begitu, hipotesis (H3) terdukung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ialah menguji bagaimana komisaris independen, dewan direksi, serta komite audit mempengaruhi *financial distress*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (2019-2023).
2. Dewan direksi berpengaruh signifikan dalam mengurangi *financial distress* perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (2019-2023).
3. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (2019-2023).

Saran

1. Dapat meluaskan objek perusahaan dengan menambah objek perusahaan dengan menambah sektor usaha lainnya.
2. Dapat menambahkan variabel, tahun serta jenis bisnis yang lebih beragam agar temuan riset lebih akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Alexandra, C., Lionardi, M., William, W., Jennefer, S., & Meiden, C. M. (2022a). Studi literatur: Pengaruh faktor Good Corporate Governance terhadap financial distress. *Owner*, 6(1), 111–122. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.536>
- Amanda, N. F., & Muslih, M. (2020). The effect of operating cash flow, independent commissioners, capital structures on financial distress. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 1–23.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sample dalam penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*.
- Anggraeni, D., Erijawati, E., Sutrisna, & Alexander. (2021). Analisis financial distress Altman Z-score dengan pendekatan data mining pada perusahaan manufaktur subsektor logam periode 2018–2020 yang terdaftar di BEI. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 13. www.idx.co.id
- Arini, E. Wi. (2021). Pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal dalam badan usaha milik negara persero. *Jurnal Rechtsens*, 10(2).
- Asril, J. (2019). Etika bisnis dan konsep Good Corporate Governance dalam menciptakan perusahaan berbasis nilai. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3.
- Dwi Putra, R., & Serly, V. (2020). Pengaruh karakteristik komite audit dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160–3178. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.275>
- Emerald, G., Zaitul, & Mulatsih, L. S. (2023). Kesulitan keuangan perusahaan semasa Covid-19. *Owner*, 7(3), 2205–2216. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1401>
- Fara Fatima, D., Muharam, H., & Octavio, D. Q. (2023). Analisis pengaruh keberagaman dewan direksi terhadap kemungkinan financial distress dengan ROA dan firm size sebagai variabel kontrol (Studi kasus pada bank umum yang terdaftar di BEI pada tahun 2016–2020). *Diponegoro Journal of Management*, 12(1), 1–12.
- Fathonah, A. N. (2016). Pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap financial distress. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Febriyanti, F. N., & Khalifaturofi'ah, S. O. (2023a). Good Corporate Governance dan financial distress pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 28(2), 274–291. <https://doi.org/10.24912/je.v28i2.1625>
- Fitria, A., Friantin, S. H. E., & Nurdyastuti, T. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *ADVANCE*.
- Franita, R. (2018). Mekanisme Good Corporate Governance dan nilai perusahaan (H. Wahyuni, Ed.). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.

- Gao, R., Cui, S., Wang, Y., & Xu, W. (2025). Predicting financial distress in high-dimensional imbalanced datasets: A multi-heterogeneous self-paced ensemble learning framework. *Financial Innovation*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00745-w>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate*. Universitas Diponegoro.
- Goh, T. S. (2023). *Monograf: Financial distress (Edisi pertama)*. Indomedia Pustaka.